

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifuddin, Muhammad, Membumikan Pengawasan Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).

Arimadona, dkk, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara, (Jakarta: Bawaslu, 2019).

Asshiddiqie, Jimly, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Pers, (Jakarta: Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005).

_____. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Popular, 2007).

_____. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018).

_____. Desain Pengawasan Pemilihan Serentak, (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021).

Budiardjo, Miriam, Masalah Kenegaraan, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (Jakarta: Konpress, 2013).

H, Darmawati, Penerapan Demokrasi Dalam Islam, (Yogyakarta: FA Press, 2014).

Is, Muhamad Sadi, Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2021).

- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983).
- Maria, Linlin dan Dion Marendra, Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020).
- Mawardi, Irvan dan Muhamad Jufri, Keadilan Pemilu: Desain Baru Penyelesaian Pelanggaran Administratif di Bawaslu, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2021).
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Rofiuddin, Tedi Kholiludin, dan Heri C. Santoso, Torehan Sejarah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah, 2019).
- Safirudin, Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Siagian, Sondang P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Situmorang, Viktor M. dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah Cetakan ke II, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1998).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, Bahan Ajar “Demokrasi”, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012).

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013).

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011).

_____. Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011).

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2011).

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).

Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Jurnal

Amal, Bakhrul. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018).” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306.

- Handala, Andi Setiawan & Hilmi. “Pemilihan Umum Serentak.” *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 322–40.
- Hermanto, Rudi, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no.2 (2020):1-23.
- Ibrahim, Muhlis Maulana, Gustiana A Kambo, Muhammad Muhammad, and Andi Baharuddin. “Batasan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019.” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2021): 169. doi:10.33506/jn.v6i2.1212.
- Jumaeli, Eli. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu.” *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Kurniawan, “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan dan Upaya Penyelesaiannya”, *JALHu: Jurnal Al-Mujaddin Humaniora* 7, no. 2 (2021):78-86.
- Leftew, Maksimus dan Lidia Priscilla Pattiasina, “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu”, *Pattimura Legal Journal* 1, no.2 (2022):74-85.
- Lusy Liany. “Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia.” *Jurnal Lex Jurnalica* 15, no. 3 (2018): 308–22.
- Mahsun, Suaidi, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Zunnuraeni. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019” *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 106–17.
- Muslih, Andre Pebrian Perdana, dan Kamal Fahmi Kurnia, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis”, *Justicia Sains:Jurnal Ilmu Hukum* 6, no.1 (2021):180-202.

- Nizam, Achmad Rifqi, R Fauzi Zuhri Pradika dan Anwar Noris, “Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum”, *E-jurnal Spirit Pro Patria* 5, no.2 (2019):108-117.
- Nugraha, Munandar, “Bawaslu dan Penegakan Hukum Pemilu”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020):117-126.
- Putri, Conie Pana, “Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Australia dan Indonesia)”, *Jurnal Thengkyang* 3, no. 1 (2019):90-105.
- Rudi Hermanto. “Problematisasi Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020): 1–23.
- Seac, Angelo Emanuel Flavio dan Sirajuddin, “Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu”, *Legal Spirit* 1, no.2 (2017):83-99.
- Seac, Angelo Emanuel Flavio, Anwar Cengkeng, dan Lukman Hakim, “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu”, *Journal KPU* (2019).
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.
- Sugiman, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no.2 (2020):179-182.
- Sumodiningrat, Aprilian. “Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 180. doi:10.31078/jk1918.
- Supriyadi, “Dinamika Penangan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada), *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no.2 (2020):141-158.

Tahir, Muchlas M, “Perilaku Penyelenggaraan Pemilu Dalam Tahapan Distribusi Logistik dan Antisipasi Perilaku Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no.2 (2020):56-66.

Zulkarnaen,Wandy, Iis Dewi Fitriani, dan Nina Yuningsih, “Pengembangan *Supply Chain Management* Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah dan Tepat Waktu Bebas *Human Resources Competency Development* di KPU Jawa Barat”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no.2 (2020):222-243.

Laporan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, Laporan (Jakarta, 2020).

Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2014 (Jakarta: 2014).

_____. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2014 (Jakarta: 2014).

_____. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2016, Laporan Kinerja (Jakarta, 2017).

_____. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Jakarta, 2018).

_____. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Jakarta, 2019).

_____. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020, Laporan Kinerja (Jakarta, 2021).

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2018).

_____. Laporan Informasi Serta Merta Kepemiluan mengenai Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah atas nama Awigra Terkait Pencalonan DPD, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2018).

_____. Laporan Informasi Serta Merta Kepemiluan mengenai Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah atas nama Niam Syukri Terkait Pencalonan DPD, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2018).

_____. Laporan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2018).

_____. Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DRPD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2018).

_____. Laporan Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Laporan Pengawasan Logistik Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Laporan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Laporan Analisis Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Jateng, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2019).

_____. Peta Penanganan Pelanggaran Pilpres 2019 di Jawa Tengah, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (Semarang, 2020).

Artikel

Maulana, Muhammad Ihsan dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu.” Evaluasi Pemilu Tahun 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 17 Maret 2020, halaman 1-19.

Rudhi Achsoni, “Rekontruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu”, Evaluasi Pemilu Tahun 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, 17 Maret 2020, halaman 4.

Skripsi

Maulana, Alfian, “Wewenang Penegakan Hukum Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020).

Tesis

Andiraharja, Diyar Ginanjar, “Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu”, (Tesis Magister Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Sianturi, Budi Evantri, “Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, dan Kode Etik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015)”, (Tesis Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

Surat Kabar

Supriyanto, Didik “Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru”, (Kompas, 8 November 2017), halaman 1.

Internet

Ad, Pemilu di Jateng Lancar, dikutip <https://jatengprov.go.id/publik/pemilu-di-jateng-lancar/> diakses pada 22 Januari 2023 pukul 09.47 WIB.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Visi Misi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dikutip dalam website <https://jateng.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-Pemilu/> diakses pada 11 Januari 2023 pada pukul 20.00 WIB.

Bawaslu RI, Sejarah Pengawasan Pemilu, dikutip dalam website <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada 05 Januari 2023 pada pukul 19.08 WIB.

Databoks, Jumlah DPT di Provinsi Jawa Tengah 27,9 Juta, dikutip dalam website <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/17/jumlah-dpt-di-provinsi-jawa-tengah-279-juta> diakses pada 02 Januari 2023 pada pukul 12.34 WIB.

DW.com, KPU Umumkan Hasil Pemilu 2019, dikutip dalam website <https://www.dw.com/id/kpu-umumkan-hasil-pemilihan-umum-2019/a-48811389> diakses pada 10 Januari 2023 pada pukul 19.06 WIB.

Nugrogo, Wisnu Adhi, KPU Jateng tingkat partisipasi Pemilu 2019 capai 80 persen, dikutip dalam website <https://jateng.antaranews.com/berita/235435/kpu-jateng-tingkat-partisipasi-pemilu-2019-capai-80-persen> pada 03 Januari 2023 pukul 17.08 WIB.

Pradana, Jasa, Abhan Apresiasi Kerja Pemantau Pemilu 2019, dikutip dalam website <https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-apresiasi-kerja-pemantau-Pemilu-2019> diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 03.47 WIB.

Kamus

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dikutip dalam website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Hasil Wawancara

Sholihatun, Anik, Wawancara, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 15 Maret 2023).

Sianturi, Budi Evantri, Wawancara, Staff Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 15 Maret 2023).

LAMPIRAN

1. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019



DUGAAN PELANGGARAN



16.427
PELANGGARAN
ADMINISTRASI



426
PELANGGARAN
KODE ETIK



2.798
PELANGGARAN
PIDANA



1.518
PELANGGARAN
HUKUM LAINNYA

HASIL PENANGANAN PELANGGARAN



16.134
PELANGGARAN
ADMINISTRASI



373
PELANGGARAN
KODE ETIK



582
PELANGGARAN
PIDANA



1.475
PELANGGARAN
HUKUM LAINNYA



2.578
BUKAN
PELANGGARAN

EFEKTIVITAS SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILU 2019



2. Peta Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah



**PETA PENANGANAN PELANGGARAN PILPRES 2019
DI JAWA TENGAH**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

**TREN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
PIDANA			
1	<i>Money Politic</i>	64	Kab. Banjarnegara : 2 kasus Kab. Banyumas : 13 kasus Kab. Batang : 3 kasus Kab. Blora : 1 kasus Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Brebes : 3 kasus Kab. Cilacap : 2 kasus Kab. Grobogan : 2 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Klaten : 1 kasus Kab. Kudus : 1 kasus Kab. Magelang : 5 kasus Kab. Pati : 1 kasus Kab. Pekalongan : 2 kasus Kab. Purbalingga : 1 kasus Kab. Purworejo : 2 kasus Kab. Semarang : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 2 kasus Kab. Tegal : 2 kasus Kab. Temanggung : 1 kasus Kab. Wonogiri : 7 kasus Kab. Wonosobo : 1 kasus Kota Pekalongan : 2 kasus Kota Salatiga : 1 kasus Kota Semarang : 4 kasus Kota Surakarta : 1 kasus Kota Tegal : 1 kasus
2	Pelibatan Pihak dilarang	13	Kab. Banjarnegara : 1 kasus Kab. Batang : 1 kasus Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Demak : 2 kasus Kab. Kudus : 1 kasus Kab. Magelang : 1 kasus Kab. Pekalongan : 1 kasus Kab. Pemalang : 1 kasus Kab. Purbalingga : 1 kasus Kab. Purworejo : 2 kasus Kota Semarang : 1 kasus
3	Tindakan Menguntungkan oleh Kades	20	Kab. Banjarnegara : 1 kasus Kab. Batang : 1 kasus Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Brebes : 2 kasus Kab. Grobogan : 1 kasus

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Kab. Karanganyar : 1 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Pekalongan : 2 kasus Kab. Pemalang : 1 kasus Kab. Purbalingga : 1 kasus Kab. Semarang : 1 kasus Kab. Sragen : 2 kasus Kab. Tegal : 2 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus Kab. Wonosobo : 2 kasus
4	Kampanye di luar Jadwal	17	Prov. Jateng : 1 kasus Kab. Banyumas : 1 kasus Kab. Batang : 1 kasus Kab. Blora : 1 kasus Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Karanganyar : 1 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Kendal : 1 kasus Kab. Kudus : 1 kasus Kab. Purbalingga : 1 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Wonogiri : 2 kasus Kota Pekalongan : 1 kasus Kota Salatiga : 1 kasus Kota Surakarta : 1 kasus Kota Tegal : 1 kasus
5	Kampanye di tempat Ibadah	7	Kab. Banyumas : 1 kasus Kab. Batang : 1 kasus Kab. Kendal : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 1 kasus Kota Magelang : 1 kasus Kota Salatiga : 1 kasus Kota Semarang : 1 kasus
6	Kampanye di tempat Pendidikan	12	Kab. Banyumas : 5 kasus Kab. Brebes : 2 kasus Kab. Demak : 1 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Kendal : 1 kasus Kab. Wonosobo : 1 kasus Kota Surakarta : 1 kasus
7	Penggunaan Fasilitas Pemerintah	25	Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Jepara : 2 kasus Kab. Karanganyar : 1 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Kendal : 1 kasus Kab. Klaten : 1 kasus Kab. Kudus : 2 kasus

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Kab. Magelang : 1 kasus Kab. Pekalongan : 1 kasus Kab. Pemalang : 1 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Sragen : 1 kasus Kab. Wonosobo : 3 kasus Kota Magelang : 1 kasus Kota Pekalongan : 1 kasus Kota Semarang : 2 kasus Kota Surakarta : 1 kasus Kota Tegal : 3 kasus
8	Ketidakabsahan Dokumen Pencalonan	1	Kab. Magelang
9	Perusakan APK	7	Kab. Demak : 2 kasus Kab. Pati : 1 kasus Kab. Rembang : 1 kasus Kab. Tegal : 1 kasus Kab. Temanggung : 1 kasus Kota Semarang : 1 kasus
10	Kampanye Negatif	3	Kab. Magelang : 2 kasus Kab. Sukoharjo : 1 kasus
11	Penggelembungan Suara	1	Kota Semarang
12	Intervensi hak pilih seseorang	1	Kab. Brebes
13	Pemberian Materi Lain	1	Kab. Banyumas
14	Penghinaan Calon Presiden	1	Kab. Jepara
15	Penggunaan Hak Pilih Lebih dari 1 kali	1	Kab. Tegal
16	Pemalsuan Dokumen	1	Kab. Tegal
ADMINISTRASI			
17	Proses DPT	23	Kab. Banyumas : 18 kasus Kab. Pekalongan : 1 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Tegal : 2 kasus Kota Salatiga : 1 kasus
18	APK/ Bahan Kampanye Ilegal/Mobil Branding	211	Kab. Banyumas : 1 kasus Kab. Batang : 1 kasus Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Brebes : 41 kasus Kab. Karanganyar : 11 kasus Kab. Klaten : 1 kasus Kab. Kudus : 40 kasus Kab. Purbalingga : 4 kasus Kab. Rembang : 1 kasus Kab. Tegal : 28 kasus Kab. Wonogiri : 15 kasus Kota Pekalongan : 67 kasus
19	Proses Pendaftaran Calon Legislatif	3	Prov. Jateng : 2 kasus Kab. Tegal: 1 kasus
20	Kampanye tanpa STTP	48	Kab. Banyumas : 11 kasus

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Jepara : 2 kasus Kab. Klaten : 2 kasus Kab. Purbalingga : 5 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Rembang : 1 kasus Kab. Semarang : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 2 kasus Kab. Wonosobo : 1 kasus Kota Magelang : 4 kasus Kota Pekalongan : 2 kasus Kota Semarang : 15 kasus
21	Penggunaan Fasilitas Negara	7	Kab. Demak : 1 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 2 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus Kota Salatiga : 2 kasus
22	Proses Pembentukan Penyelenggara Pemilu	4	Kab. Sukoharjo : 1 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus Kota Magelang : 1 kasus Kota Semarang : 1 kasus
23	Kampanye di <i>White Area</i>	2	Kab. Klaten : 1 kasus Kab. Kudus : 1 kasus
24	Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT	9	Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Jepara : 1 kasus Kota Magelang : 1 kasus Kota Semarang : 5 kasus
25	Kesalahan Penghitungan Suara	1	Kab. Banyumas
26	Pembukaan Kotak Suara Tidak Sesuai Prosedur	1	Kab. Banyumas
27	Pemilih Tidak Mengisi C3	1	Kab. Boyolali
28	Sambutan KPPS Berisi Perkenalan Caleg	1	Kab. Semarang
29	Penambahan Suara	2	Kab. Boyolali : 1 kasus Kota Semarang : 1 kasus
30	Ketidakprofesionalan KPUD/Panwascam/KPPS	4	Kab. Demak : 1 kasus Kab. Kebumen : 1 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus Kota Semarang : 1 kasus
31	Jumlah Surat Suara Tidak Sesuai C1	2	Kab. Demak
32	KPPS Tidak Berhak Menandatangani Surat Suara	1	Kab. Jepara
33	Pemilih Tidak Mendapat Surat Suara Lengkap	1	Kab. Pekalongan
34	Pembuatan A5 Manual	1	Kab. Wonosobo
35	Pemberian A5 tidak sesuai prosedur	1	Kab. Kendal
36	Form C2 Tidak Terisi	1	Kota Magelang
37	Saksi tidak sesuai dengan Surat Mandat	1	Kab. Boyolali
38	Kesalahan Data DA.1	5	Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Brebes : 2 kasus

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Kab. Klaten : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 1 kasus
39	Perbedaan C1 dan DA1	1	Kab. Boyoali
40	Kesalahan input DAA1	1	Kota Surakarta
41	Kesalahan pada DPK	1	Kab. Brebes
42	Penyerahan Berkas Pencalonan yang tidak sesuai Persyaratan	1	Kab. Brebes
43	Surat Suara Kurang/Adanya Selisih antara Surat Suara Pemilih dengan Jumlah Surat Suara DPD	2	Kota Semarang
44	Caleg DPRD yang tidak sesuai persyaratan	1	Kab. Grobogan
45	Penyelenggara Pemilu terlibat Kampanye/Kegiatan Parpol	8	Kab. Banjarnegara : 1 kasus Kab. Banyumas : 2 kasus Kab. Boyolali : 1 kasus Kab. Pekalongan : 1 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Semarang : 1 kasus Kota Pekalongan : 1 kasus
46	Penyelenggara Pemilu terlibat dalam keanggotaan Parpol	2	Kab. Wonogiri
47	<i>Money politic</i> (ADM)	2	Kota Semarang
48	Pelibatan pihak yang dilarang (ADM)	1	Kab. Sukoharjo
49	Kampanye di luar Jadwal (ADM)	1	Kab. Blora
50	Kampanye di tempat Ibadah (ADM)	2	Kab. Demak : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 1 kasus
51	Ketidaknetralan ketua RW (ADM)	1	Kota Semarang
52	Netralitas Kepala Daerah (ADM)	1	Kab. Sukoharjo
53	Kesalahan Penetapan Tim Kampanye	1	Kab. Banyumas
54	Verifikasi Anggota Parpol Tidak Sesuai Prosedur	1	Kab. Batang
55	Penyelenggara Pemilu mengunggah konten Kampanye	2	Kab. Wonosobo : 1 kasus Kota Tegal : 1 kasus
56	Kampanye terbuka tidak sesuai prosedur	1	Kab. Sukoharjo
KODE ETIK			
57	Penyalahgunaan Wewenang oleh KPU	1	Prov. Jateng
58	Penyerahan BA Pencalonan Tidak Sesuai Prosedur	1	Prov. Jateng
59	Penyelenggara Pemilu Tidak Profesional	1	Kab. Brebes
60	Netralitas Penyelenggara Pemilu	3	Prov. Jateng : 1 kasus Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Rembang : 1 kasus
PELANGGARAN LAINNYA			
61	Netralitas Kepala Daerah	2	Prov. Jateng : 1 kasus Kab. Sragen : 1 kasus
62	Netralitas ASN	39	Prov. Jateng : 9 kasus Kab. Banjarnegara : 1 kasus Kab. Blora : 1 kasus Kab. Boyolali : 2 kasus Kab. Brebes : 3 kasus Kab. Jepara : 1 kasus

NO	TREND DUGAAN PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
			Kab. Klaten : 3 kasus Kab. Magelang : 1 kasus Kab. Pemalang : 1 kasus Kab. Purbalingga : 2 kasus Kab. Purworejo : 1 kasus Kab. Sragen : 3 kasus Kab. Sukoharjo : 1 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus Kota Pekalongan : 2 kasus Kota Salatiga : 1 kasus Kota Semarang : 3 kasus Kota Tegal : 3 kasus
63	Netralitas Kades / Perangkat Desa/ BPD/ PKH/P3MD	40	Prov. Jateng : 1 kasus Kab. Banjarnegara : 5 kasus Kab. Banyumas : 3 kasus Kab. Blora : 3 kasus Kab. Boyolali : 3 kasus Kab. Brebes : 1 kasus Kab. Demak : 1 kasus Kab. Kendal : 1 kasus Kab. Klaten : 3 kasus Kab. Kudus : 1 kasus Kab. Magelang : 4 kasus Kab. Pati : 1 kasus Kab. Pekalongan : 2 kasus Kab. Purbalingga : 3 kasus Kab. Purworejo : 2 kasus Kab. Rembang : 1 kasus Kab. Sukoharjo : 4 kasus Kab. Wonogiri : 1 kasus
	TOTAL	622	

Semarang, 20 April 2020
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Proses

ttd.

SADHU SUDIYARTO, S.H
NIP. 19680429 199603 1

3. Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan Pengawasan di berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



4. Surat Izin Riset/Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 09 /UN7.F1/AK/III/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

01 MAR 2023

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah
Jln Papandayan Selatan Nomor 1 Gajahmungkur,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Fiorentina Miftha Rahadevi
NIM : 11000119120098
alamat : Jalan Gondang Timur Dalam 1 Nomor 1 Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
nomor HP : 089635850878
bidang minat : Hukum Tata Negara (HTN)
judul skripsi : Dwifungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Setno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711181993032002

5. Surat Balasan Instansi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslujatengprov.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : 0740 /HM.02.04/JT/4/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Riset/Penelitian

Semarang, 19 April 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Di-

Tempat

Berdasarkan surat Saudara nomor 09/UN7.F1/AK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, dengan hormat kami sampaikan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan riset/penelitian di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Mahasiswa:

Nama : Fiorentina Miftha Rahadevi
NIM : 11000119120098
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dwifungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat,

Kartini Tjandra Lestari

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)

6. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H. selaku Staff Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Wawancara dengan Ibu Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd. selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

